

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang padat dan luas wilayahnya, menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah lingkungan masyarakat yang bervariasi dan kompleks (Babatunde, 2019). Kemiskinan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan sosial merupakan perhatian serius bagi negara, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah (Lang, Jing & Yin, Runsheng, 2019). Masalah ini kompleks yang melibatkan masalah pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakmampuan yang menuntut upaya kolaboratif dan program pengentasan kemiskinan (Alamin, 2010). Di tengah tantangan ini, peran keluarga sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah kemiskinan (Dewi, 2022). Melalui program pemberdayaan keluarga, upaya masyarakat untuk berubah menuju keadaan yang lebih baik dapat ditingkatkan (Kamilah, 2021).

Selain menghadapi tantangan kompleks dalam bidang kemiskinan, *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan jumlah individu yang berada dalam kondisi kemiskinan. Pada bulan Maret 2021, total penduduk yang miskin di Indonesia berjumlah 27,54 juta individu. Jika dibandingkan dengan data Maret 2020, terdapat peningkatan sekitar 1,12 juta orang yang termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu di Indonesia. Fakta ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Indonesia untuk terus berupaya dalam mengatasi masalah kemiskinan yang berlangsung lama, bahkan hingga saat ini (BPS, 2021).

Provinsi Jawa Barat menempati peringkat kedua tertinggi dalam jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia, setelah Jawa Timur dengan jumlah orang miskin telah mencapai angka 4 juta orang (7,97%). Kota Bandung kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar, sebagaimana yang diindikasikan dalam data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2022. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berada dalam situasi kemiskinan di

Nabilah Nurul Auliya, 2023

**HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN KEMANDIRIAN KELUARGA (STUDI PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN SUKARASA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kota Bandung. Menurut data BPS yang dirilis pada bulan Februari 2022, tercatat bahwa total penduduk kurang mampu di Kota Bandung pada tahun 2020 sebanyak 100.020 orang dan jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 112.500 orang pada tahun 2021.

Situasi yang tidak normal ini mewajibkan pemerintah Indonesia untuk melakukan pemangkasan anggaran pada beberapa kementerian serta melakukan pengalihan fokus anggaran untuk menghentikan menyebarnya virus COVID-19. Selain upaya dalam menuntaskan penularan COVID-19, lembaga pemerintah telah konsisten sejak tahun 2007, melalui Kementerian Sosial, dalam usaha untuk memutus lingkaran kemiskinan. Salah satu program yang digunakan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang berfungsi sebagai program perlindungan sosial atau dikenal juga di lingkup internasional sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT).

Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, yang membahas Program Keluarga Harapan (PKH), mengartikan bahwa PKH bermanfaat dalam hal memberikan akses kepada keluarga yang berada dalam kondisi kurang mampu yang telah terdaftar melalui sistem data atau informasi terpadu yang mencakup berbagai aspek pengentasan kemiskinan, termasuk dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Kemensos RI, 2019, hlm. 26-27). Program Keluarga Harapan adalah suatu inisiatif dalam penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada penjaminan sosial. Program ini muncul karena terdapat keluarga atau individu yang masih menghadapi kondisi kemiskinan dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah meluncurkan PKH pada bulan Juli 2007. Dalam jangka pendek, bantuan sosial tunai dengan syarat yang diberikan diharapkan dapat meringankan biaya bagi keluarga dalam kondisi kurang mampu. Dalam jangka menengah, program ini diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga penerima manfaat agar secara berkesinambungan memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan, dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang tangguh dan berpengetahuan. Tujuan jangka panjang dari program ini yaitu mengakhiri siklus penurunan ekonomi dari satu generasi ke generasi berikutnya

Nabilah Nurul Auliya, 2023

**HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN KEMANDIRIAN KELUARGA (STUDI PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN SUKARASA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Pedoman Pelaksanaan PKH 2016).

Sehubungan dengan hal tersebut, agar bantuan sosial bersyarat ini tepat sasaran, perlu adanya tenaga pendamping sosial PKH yang ahli di bidangnya, dengan salah satu dari mereka memiliki keahlian dalam mengonsolidasi keluarga penerima manfaat untuk mencapai kesadaran akan kemandirian, dengan tujuan menjadi individu yang terus berkembang melalui aktivitas kreatif yang berimplikasi pada ekonomi, hingga mencapai status mandiri dalam kesejahteraan. Walau demikian, tugas dan tanggung jawab pendamping PKH untuk mengubah perilaku keluarga penerima manfaat PKH untuk tidak ketergantungan pada bantuan sosial tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pada saat di lapangan, khususnya Kelurahan Sukarasa tiap pendamping menghadapi rintangan.

Kelurahan Sukarasa dengan total penduduk berjumlah 14.137 orang yang meliputi 7.320 penduduk laki-laki dan 6.817 perempuan, data ini didapatkan berdasarkan Laporan Penduduk Kelurahan Sukarasa Bulan Agustus Tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 sampai dengan 2020 ialah 1.45%. Total Kepala Keluarga (KK) keseluruhan di Kelurahan Sukarasa saat ini mencapai sekitar 3.115 KK. Mengacu pada informasi penduduk yang diperoleh dari Kecamatan Sukasari dalam angka yang dipublikasikan oleh BPS, kepadatan penduduk Kelurahan Sukarasa ialah sebanyak 11.021 jiwa per km<sup>2</sup> dan jika melihat pertumbuhan populasi, kepadatan penduduknya diprediksi akan terus meningkat seiring berjalannya waktu (Profil Kelurahan Sukarasa, 2022).

Tabel 1. 1 Jumlah Penerima PKH di Kelurahan Sukarasa Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	168	170	212	213	225

Mengacu pada informasi yang tertera dalam tabel 1.1, total peserta PKH di Kelurahan Sukarasa tahun 2018 sebesar 168 KPM, tahun 2019 berjumlah 170 KPM, pada tahun 2020 berjumlah 212 KPM, di tahun 2021 berjumlah 213 KPM, pada tahun 2022 berjumlah 225 KPM. Sukarasa merupakan bagian dari kelurahan di Kecamatan Sukasari yang mendapat bantuan PKH. Masyarakat Kelurahan Sukarasa mayoritas termasuk dalam masyarakat yang berada dibawah dari garis

Nabilah Nurul Auliya, 2023

**HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN KEMANDIRIAN KELUARGA (STUDI PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN SUKARASA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kecukupan.

Keluarga penerima manfaat diharapkan memenuhi kriteria untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pendidikan anak dan kesehatan keluarga untuk mencapai fokus PKH dalam mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui upaya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial (Kamilah, 2021).

Dalam konteks ini, penting bagi para pengambil kebijakan untuk merangkul pendekatan holistik dalam mengatasi peningkatan kemandirian keluarga penerima manfaat PKH, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. PKH sebagai program pemerintah dengan maksud memperbaiki taraf hidup dan kemandirian keluarga miskin melalui pemberian bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. Salah satu aspek yang ingin dicapai program ini adalah untuk mendorong keluarga penerima manfaat agar lebih mandiri secara finansial dan sosial.

Keluarga penerima manfaat PKH masih banyak yang belum mandiri dibuktikan dengan berbagai masalah seperti ketergantungan pada bantuan sosial, yakni keluarga penerima manfaat PKH seringkali mengalami ketergantungan pada bantuan sosial yang diberikan oleh program tersebut. Hal ini dapat menghambat kemandirian mereka dalam jangka panjang. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan keluarga penerima manfaat PKH mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk mandiri secara finansial. Hal ini membuat mereka sulit untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh program keluarga harapan dengan efektif. Terbatasnya akses pada modal berpengaruh terhadap keluarga penerima manfaat PKH yang seringkali memiliki akses terbatas pada modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha atau meningkatkan usaha yang sudah ada. Hal ini dapat menghambat kemandirian mereka dalam menghasilkan pendapatan yang stabil. Kurangnya jaringan sosial dan peluang pun mengakibatkan keluarga penerima manfaat PKH seringkali mengalami kesulitan dalam membangun jaringan sosial dan memperoleh peluang bisnis yang dapat membantu mereka

Nabilah Nurul Auliya, 2023

**HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN KEMANDIRIAN KELUARGA (STUDI PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN SUKARASA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam meningkatkan kemandirian. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam mencapai kemandirian secara sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ini, partisipasi dalam program keluarga harapan menjadi salah satu aspek yang berpotensi memengaruhi kemandirian keluarga penerima manfaat. Dengan aktif terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh program keluarga harapan atau kegiatan sosial lainnya di lingkungan sekitar, keluarga penerima manfaat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan kemandirian. Semua ini bertujuan untuk memastikan keluarga miskin dapat keluar dari situasi kemiskinan, mencapai kesejahteraan, dan mendukung PKH dalam memutus siklus kemiskinan dengan aspirasi untuk memupuk semangat kemandirian. Oleh karena itu, bantuan sosial tidak hanya menjadi kontribusi finansial semata, melainkan juga menjadi sarana untuk memberdayakan komunitas miskin, dengan tujuan mewujudkan kemandirian.

Menurut Wijayanti (2011), kemandirian masyarakat merujuk pada keadaan di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk berpikir, membuat keputusan, dan melaksanakan tindakan yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, menggunakan daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam kasus keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), kemandirian mengacu pada kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan atau program dari pemerintah atau pihak lain. Dalam konteks PKH, kemandirian keluarga mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, serta kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pernyataan ini didukung oleh hasil riset sebelumnya, seperti yang terungkap dalam penelitian Lobo (2019), yang menunjukkan bahwa PKH telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat miskin di wilayah Papua. Temuan dari Luthfi (2019) juga mengindikasikan bahwa bantuan PKH berdampak positif pada kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak dalam keluarga miskin, serta

memberikan kesadaran bagi peserta PKH mengenai pentingnya layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian masyarakat. Selain itu, hasil penelitian Septiani et al., (2019) menunjukkan bahwa peran pendamping PKH memiliki signifikansi yang kuat dalam mendukung kemandirian keluarga. Semakin efektif peran pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya, maka semakin besar kontribusinya dalam meningkatkan kemandirian keluarga.

Merujuk pada hasil riset yang dilakukan oleh Norman (2020) yang berjudul "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Partisipasi Pendidikan dan Kesehatan Pada Program Keluarga Harapan (PKH)", ditemukan kesimpulan bahwa setiap tahun terdapat keluarga yang mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka melalui bantuan sosial ini, dengan penghasilan yang sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh setiap keluarga penerima manfaat. Meskipun bantuan tersebut semakin bertambah dalam jumlahnya, dimulai dari 800 ribu sampai dengan 4 juta rupiah pada tahun 2019, keluarga penerima manfaat cenderung enggan untuk menghentikan partisipasi mereka dalam PKH. Namun, pola pikir semacam ini seharusnya tidak dibiarkan, karena memiliki dampak negatif terhadap semangat kemandirian masyarakat. Terdapat kemungkinan bahwa program pemerintah ini berakhir hanya melindungi status kemiskinan itu sendiri, bukannya memberikan perlindungan sosial (*social security*).

Namun, belum banyak penelitian yang menginvestigasi hubungan antara tingkat partisipasi dalam program keluarga harapan dengan kemandirian keluarga secara lebih sistematis. Karena alasan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan guna mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang memengaruhi tingkat kemandirian keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan serta memberikan masukan yang berguna bagi penyelenggara untuk meningkatkan efektivitas program keluarga harapan.

Dari paparan tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang tujuannya adalah mengetahui "Hubungan Tingkat Partisipasi dalam Program Keluarga Harapan dengan Kemandirian Keluarga (Studi Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sukarasa) "

Nabilah Nurul Auliya, 2023

**HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN KEMANDIRIAN KELUARGA (STUDI PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN SUKARASA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam upaya merumuskan masalah yang akan diinvestigasi, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu diangkat, antara lain:

1. Keluarga penerima manfaat PKH seringkali mengalami ketergantungan pada bantuan sosial yang diberikan oleh program tersebut. Hal ini dapat menghambat kemandirian mereka dalam jangka panjang.
2. Mayoritas keluarga yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah dan kurangnya pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk mandiri secara finansial. Akibatnya, situasi ini membuat mereka mengalami kesulitan dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan dengan efektif.
3. Keluarga penerima manfaat PKH seringkali memiliki akses terbatas pada modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha atau meningkatkan usaha yang sudah ada. Hal ini dapat menghambat kemandirian mereka dalam menghasilkan pendapatan yang stabil.
4. Keluarga penerima manfaat PKH seringkali mengalami kesulitan dalam membangun jaringan sosial dan memperoleh peluang bisnis yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan kemandirian. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam mencapai kemandirian secara sosial dan ekonomi.

Dengan merujuk kepada analisis permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti seperti berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi keluarga penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan?
2. Bagaimana tingkat kemandirian keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan?
3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat partisipasi dalam Program Keluarga Harapan dengan tingkat kemandirian keluarga?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur dan memperoleh gambaran mengenai hubungan tingkat partisipasi dalam program keluarga harapan dengan kemandirian keluarga.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi keluarga penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan.
2. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.
3. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat partisipasi dalam Program Keluarga Harapan dengan tingkat kemandirian keluarga.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan keuntungan baik dalam sisi teoritis dan praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pengembangan teori kemandirian keluarga dan program pemberdayaan masyarakat. Dengan meneliti hubungan antara tingkat partisipasi dalam program keluarga harapan dengan kemandirian keluarga, dapat diperoleh informasi lebih detail mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan kemandirian keluarga. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan berdampak positif bagi keluarga penerima manfaat PKH dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan dalam hal praktis bagi program keluarga harapan dan keluarga penerima manfaat. Hasil studi ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program keluarga harapan yang lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian keluarga penerima manfaat. Selain itu, hasil penelitian juga dapat memberikan informasi dan wawasan bagi keluarga

Nabilah Nurul Auliya, 2023

*HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN KEMANDIRIAN KELUARGA (STUDI PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN SUKARASA)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



penerima manfaat PKH dalam meningkatkan kemandirian keluarga, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Penyusunan skripsi ini mengikuti Panduan Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2021 sejalan dengan Peraturan Rektor UPI Nomor 7867/UN40/HK/2021, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini meliputi pendahuluan penelitian, rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka struktur skripsi. Bagian ini memberikan gambaran mengenai isu yang akan diidentifikasi dalam penelitian.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bagian ini menguraikan analisis literatur dan dasar teoritis yang akan memberikan dukungan yang kokoh tentang kerangka fokus riset yang sedang diteliti. Secara esensial, bagian ini meliputi beberapa elemen berikut:

- 1) Prinsip-prinsip, teori-teori, norma-norma, model-model, dan persamaan-persamaan utama beserta turunannya dalam disiplin ilmu yang sedang dianalisis;
- 2) Studi sebelumnya yang relevan dengan fokus riset yang sedang diselidiki, termasuk metode, subjek, dan hasil temuannya;
- 3) Posisi teoritis peneliti terkait dengan isu yang sedang diteliti

Bagian ini melakukan perbandingan, kontras, serta penempatan posisi dari setiap penelitian yang dipelajari dengan menghubungkannya ke permasalahan yang tengah diinvestigasi. Tujuan dari bagian ini adalah untuk

mengungkapkan alasan dan cara penerapan teori dan hasil penelitian para ahli sebelumnya dalam studi yang dilakukan oleh peneliti.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini adalah bagian yang memiliki karakteristik prosedural, yang akan menguraikan serangkaian langkah yang akan dijalankan oleh peneliti. Bab ini akan mencakup aspek-aspek seperti rancangan penelitian, partisipan, kelompok populasi dan sampel, alat penelitian, prosedur riset, hipotesis penelitian, serta pengolahan data.

### BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan dua aspek utama, yaitu temuan yang berasal dari pengolahan serta analisis data, dan pemaparan temuan tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk menjelajahi data, menyampaikan hasil data, melakukan perhitungan data, menyimpan data, dan merancang presentasi data yang efisien.

### BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini, akan menampilkan simpulan meliputi interpretasi dan makna yang diberikan oleh peneliti terhadap temuan analisis penelitian. Bab ini juga akan merespon pertanyaan masalah yang diajukan dan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak terkait. Selain itu, bab ini akan menyajikan beberapa rekomendasi yang diarahkan untuk penelitian-penelitian yang akan datang.